

TINJAUAN MIGRASI PENDUDUK DESA-KOTA, URBANISASI DAN DAMPAKNYA

Suko Bandiyono* dan Ken F. Indrawardani**

Abstract

Based on the overview of several socio-demographic publications, this paper examine the issue of rural-urban migration and the consequences of urbanization. Urbanization is a complex phenomenon which strongly determined of rural-urban migration. Migration to large metropolitan cities from rural areas and small towns has put enormous pressure in place of destination and created many sosio-economic and demographic problems. Metropolitan cities has becomed the consentration of urban poor which mostly holds the informal jobs and live in squatter areas.

Keywords: Rural-urban migration, urbanization, sosial and demographic impacts

Artikel ini bermaksud untuk mengemukakan isu tentang migrasi desa-kota dalam hubungannya dengan urbanisasi. Urbanisasi merupakan fenomena yang kompleks dimana sebagian ditentukan oleh proses migrasi desa-kota. Migrasi penduduk ke kota-kota metropolitan dari daerah perdesaan dan dari kota-kota kecil telah menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi dan masalah demografi. Kota-kota metropolitan telah menjadi tempat konsentrasinya penduduk miskin yang umumnya bekerja di sektor informal dan bermukim di daerah kumuh.

Kata Kunci: migrasi desa kota, Urbanisasi, Dampak sosial dan demografi

Isu tentang kemiskinan telah memperoleh perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa seperti yang diucapkan oleh Sekjen PBB, Mr. Boutros Boutros- Ghali : “ *there is no greater challenge to the international community today*”. “*the United Nations has made the assaul on poverty a priority*”. Sebagai respon atas kebijakan tersebut migrasi dan urbanisasi adalah diantara isu-isu yang memperoleh perhatian dari ESCAP Committee on Poverty Alleviation through Economic and Social Development, dalam

* Suko Bandiyono adalah Peneliti Senior, sebelumnya bekerja di PPK-LIPI. E-mail: sukobandiyono@yahoo.com

** Ken F. Indrawardani adalah Alumnus FE UNSOED

pertemuan di Bangkok 16-18 Oktober 1996. Dalam pertemuan tersebut isu tentang *rural-to-urban migration and urbanization* telah didiskusikan. Committee, yang mencatat bahwa migrasi dapat membuat kontribusi positif untuk daerah perkotaan, meskipun migrasi demikian juga dapat mempunyai akibat negatif baik daerah pengirim maupun daerah penerima (Population Headliners No.254, September-October 1996). Hal ini tentu saja tergantung dari sudut pandang mana masing-masing pihak yang terlibat. Dilihat dari pelaku migrasi, dan migrasi ke kota merupakan suatu hal yang positif karena mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada penghasilan di tempat asalnya. Meskipun demikian muncul dampak negatif yang sering terjadi antara lain adalah berkembangnya permukiman kumuh dan pengangguran di kota.

Atas dasar tinjauan kepustakaan, uraian pada sub-bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan isu migrasi desa-kota yang telah mempengaruhi kondisi kehidupan penduduk perkotaan. Dampak akibat tingginya migrasi desa-kota juga dikemukakan dalam uraian tersebut.

MIGRASI DESA-KOTA

Migrasi penduduk adalah suatu bentuk respon dari adanya variasi keadaan lingkungan di mana mereka tinggal. Keadaan alam yang terus berubah, adanya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, fluktuasi kondisi ekonomi dan perkembangan penduduk melalui proses siklus kehidupannya, telah mengakibatkan penduduk melakukan mobilitas dari satu ke lain tempat. Tiap daerah mempunyai perbedaan pertumbuhan penduduk dan perbedaan perkembangan sosial-ekonomi, sehingga telah menimbulkan kesempatan-kesempatan yang berbeda pula (Bandiyono.1986). Ravenstain (1889:286) menyimpulkan bahwa keinginan sebagian orang untuk bermigrasi adalah meningkatkan dirinya "lebih baik" dalam hal material. Motif ekonomi nampaknya merupakan penyebab utama mobilitas di samping adanya alasan non-ekonomi. Alasan non-ekonomi terutama dalam upaya memperoleh kesenangan yang lebih baik atau "*bright city lights*." (Findley S. Evans, 1977). Ia juga mengamati bahwa migrasi terjadi dalam arus; baik yang menuju daerah tujuan tertentu maupun arus balik dalam arah yang berlawanan. Sebagian besar orang bermigrasi jarak dekat dan hanya sebagian kecil bermigrasi jarak jauh. Hal ini merupakan atribut dari kenyataan bahwa seseorang akan bermigrasi untuk jarak yang lebih jauh bila akan memperoleh lebih banyak kesempatan.

Untuk menerangkan adanya proses migrasi desa-kota ada beberapa model baik yang menyangkut "model gravitasi" maupun yang mengadakan pendekatan secara psikologis, ekonomi dan sosial. Teori *need and stress* menjelaskan bahwa apabila kebutuhan seseorang tidak dapat dipenuhi atau mengalami *stress* di luar batas toleransinya maka ia akan memikirkan untuk pindah ke daerah lain agar dapat memenuhi kebutuhannya. Manakala *stress* tersebut masih dalam batas toleransinya

maka ia akan tidak pindah atau cukup melakukan migrasi non-permanen, baik dengan cara ulang-alik atau sirkulasi. Sebaliknya apabila kebutuhan seseorang dapat dipenuhi maka ia akan tetap menetap atau tidak pindah (Mantra, 1978).

Dalam menjelaskan migrasi desa-kota teori ekonomi migrasi lebih relevan, karena dapat menerangkan hubungan antara pekerjaan dan migrasi. Dalam hal ini ada pertimbangan ekonomi seperti kesempatan kerja dan tingkat upah yang berbeda antara pekerjaan di desa dan kota (Bairoch, 1973:1), (Mazumdar, 1987:123). Teori ekonomi pada dasarnya memandang migrasi sebagai alat untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang (Bandiyono. 1983: 238). Hipotesis Todaro (1969) menyatakan bahwa migrasi desa-kota ditentukan oleh oleh disparitas pendapatan antara dua sektor dimana pekerjaan di sektor modern perkotaan memperoleh imbalan gaji yang baik. Apabila lapangan pekerjaan di sektor modern naik maka lebih banyak penduduk perdesaan akan bergerak masuk ke kota. Adapun perbedaan upah antara desa dan kota yang timpang akan membuat migrasi desa-kota akan terus berjalan di samping pengangguran di kota.

Dalam situasi seperti ini pengadaan lapangan pekerjaan baru tidak akan efektif dalam pengurangan pengangguran, kecuali bila dibarengi dengan kebijakan untuk menghambat mengalirnya arus migrasi desa-kota, seperti kebijakan pembangunan daerah perdesaan yang dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan upah antara desa dan kota (Moir. 1977:68). Meski pembangunan perdesaan dapat menghambat arus migrasi desa-kota, kebijakan revolusi hijau ternyata kurang sejalan dengan teori tersebut. Steel (1980) dalam studi migrasi di Surabaya membuat konklusi antara lain :

“Since the late 1960s females have become more dominant numerically in annual migration flows to Surabaya. Most of the increased female component comprised young migrants from rural areas of East Java who have migrated to Surabaya because of a significant decline in productive employment opportunities for female in agriculture since the adoption of high-yielding rice varieties and their associated technology and harvesting techniques in the late 1960s”

Proses polarisasi tanah, khususnya di Jawa, yang merupakan sumber penghidupan penduduk perdesaan rata-rata pemilikan tanahnya makin menciut dan terpecah-pecah. Di Jawa Timur misalnya dalam awal tahun 80an sedikit di atas 30 % dari rumah tangga yang punya tanah adalah kurang dari 0,1 hektar (Bandiyono 1983 :5). Masalah utama petani di Jawa selain keterbatasan tanah juga karena penambahan penduduk yang cepat. Kondisi tersebut telah menciptakan masalah surplus tenaga kerja dan *labour intensive*, yang sering dikatakan Geertz (1966) sebagai *‘agricultural involution’*. Oleh karena ada dorongan keluar penduduk perdesaan untuk mencari pekerjaan atau memperoleh pendapatan yang lebih baik. Meskipun demikian penduduk potensial dari keluarga elit perdesaan cenderung bermigrasi ke kota untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik ataupun untuk memperoleh modal dan

ketrampilan. Oleh karena itu secara teoritis “*push out* dan *pull out*” terjadi bersamaan tetapi berbeda menurut strata sosial (Bandiyono.1983:239).Selain itu tingkat pendidikan yang lebih tinggi telah meningkatkan kecenderungan bermigrasi ke kota-kota besar (Noveria, 1993: 9). Faktor-faktor yang mendorong migran meninggalkan daerah asalnya disebut faktor sentrifugal, sedangkan faktor-faktor yang menarik migran untuk kembali ke daerah asalnya disebut faktor sentripetal. Manakala kekuatan sentripetal sangat kuat maka migrasi jarang terjadi (Mantra dan Molo, 1985 : 4)

Salah satu isu penting yang sering dilontarkan oleh perencana perkotaan adalah munculnya fenomena kemiskinan yang ditimbulkan oleh proses urbanisasi dan ketimpangan distribusi penduduk dalam proses pembangunan. Meskipun lebih duapertiga penduduk Indonesia masih tinggal di daerah perdesaan namun telah terjadi mobilitas penduduk internal yang menuju ke daerah perkotaan dalam jumlah yang besar dan cenderung terus mengalami peningkatan. Mamas (2002:2) mencoba mengkaitkan migrasi desa-kota dengan urbanisasi. Migrasi desa-kota dapat dianggap menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk kota ketika angka pertumbuhan penduduk mencapai > 2,5 persen setahun. Jika angka pertumbuhan penduduk kota berada di antara 2,0 – 2,5 persen setahun maka telah mengindikasikan bahwa pertumbuhan alami lebih dominan daripada faktor migrasi. Selanjutnya manakala angka pertumbuhan penduduk < 2,5 persen setahun berarti migrasi netto adalah rendah, bahkan bisa negatif. Oleh karena itu di kota-kota yang telah menjadi tujuan utama migrasi akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja sehingga muncul persoalan pengangguran yang selanjutnya diikuti dengan proses pemiskinan. Hal ini disebut sebagai fenomena “*over-urbanization*” (Sovani, N.V. 1964) atau involusi perkotaan. Dalam kaitan ini Chander, Rames (1979: 31) menulis sebagai berikut:

“The rapid increase in population has placed constraints on the resources for food, employment, and housing. Moreover, the housing problem in urban areas has been exacerbated by the increasing in-flow of migrants from rural areas. The rising urban population especially in the low-income groups, the increasingly high cost of construction materials, and spiraling land prices have created a sizeable gap between housing demand and supply. The magnitude of this gap is reflected in many slum and squatter settlement, overcrowded housing units, and obsolescent units requiring replacement in the cities.”

Di Indonesia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggal di kota pada kurun waktu 1971-1980 sebesar 5,3 %. Pada kurun waktu 1980-1990 pertumbuhan penduduk kota tersebut mengalami kenaikan menjadi 7,85 %. Selanjutnya pada kurun waktu 1990-2000 pertumbuhan penduduk kota justru mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 4,4 %. Fenomena penurunan angka pertumbuhan penduduk kota pada kurun waktu 1990-2000 tersebut, besar kemungkinan karena penurunan komponen fertilitas dan kontribusi migrasi neto positif, kendati tidak sebesar pada dekade sebelumnya. Hal ini telah diikuti dengan penurunan jumlah anggota rumahtangga dari 4,5 orang pada tahun 1990 menjadi 3,9 orang pada tahun 2000 (Silas Johan. 2001: 1). Dalam kurun waktu 1990-2000, angka pertumbuhan penduduk perdesaan hanya -

1,6%. Hal ini menunjukkan adanya migrasi keluar dari perdesaan, atau daerah perdesaan yang telah berubah menjadi 'urban'. Fenomena tersebut sejalan dengan proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan yang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1971, 1980, 1990 dan 2000 tingkat urbanisasi di Indonesia masing-masing sebesar 17%, 22%, 31% dan 35%. Tingkat pertumbuhan penduduk kota adalah paralel dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk kota lebih besar daripada pertumbuhan penduduk perdesaan merupakan kenyataan di banyak negara (Bandiyono. 1986). Studi dari United Nations (1985 : 31) menunjukkan bahwa kota-kota cenderung berkembang lebih cepat di negara-negara yang persentase total kesempatan kerja di pertanian, dan pertumbuhan ini sebagian besar karena migrasi.

Migrasi ke daerah metropolitan sebagian berkaitan pada faktor "push" (daya dorong) seperti keterbatasan lahan yang cukup dan kesempatan kerja di perdesaan. Hogo (1983: 7) mengemukakan bahwa seperti di banyak negara ketiga, di Indonesia terjadi kenaikan mobilitas perorangan dalam spektrum kependudukan yang luas, terutama penduduk yang tinggal di perdesaan. Perubahan tersebut telah difasilitasi oleh revolusi yang benar yaitu dalam pengadaan transportasi publik, terutama transport darat diseluruh daerah, terutama di Jawa. Selain itu dengan perkembangan teknologi informasi yang makin meluas telah mempengaruhi pengetahuan, sikap dan tingkahlaku penduduk perdesaan tentang dunia perkotaan. Gemerlapan kehidupan kota yang selalu ditayangkan oleh media elektronik telah menjadi masukan yang sekaligus mempunyai kekuatan sebagai magnet bagi penduduk potensial di perdesaan dalam mengambil keputusan memilih alternatif dalam bermigrasi ke kota. Mereka umumnya telah mengunjungi kota tujuan sebelum pindah. Migran yang telah pindah di kota hanya sedikit yang mau meninggalkan, karena mereka merasa puas. Adapun untuk sirkulator meskipun kondisi ekonominya lebih tinggi daripada di tempat asal namun tinggal di kota hanya untuk sementara waktu (Costello, Michael A. et al. 1987: 116).

MIGRASI DAN URBANISASI

Migrasi penduduk desa-kota merupakan komponen urbanisasi di samping karena pertambahan alami dan reklasifikasi daerah (Bandiyono. 1986).¹ Pertambahan alami adalah eksese kelahiran melebihi kematian. Migrasi neto adalah eksese migrasi masuk

¹Becker dan Sidibe (), telah mendefinisikan urbanisasi adalah kenaikan dalam proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan—proses mobilitas penduduk ke kota-kota atau daerah permukiman padat lain. Oleh karena itu penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dapat diekspresikan sebagai persentase total penduduk di suatu daerah dan ini menjadi ukuran urbanisasi. Biasanya sisa penduduk di daerah tersebut dianggap sebagai perdesaan, meskipun ada pula beberapa negara juga mempunyai kategori tengah yang ditetapkan sebagai "semiurban." Penduduk diklasifikasikan sebagai "urban" berbeda sekali antara negara satu dengan negara lain. Definisi "urban," meski demikian, adalah sesuatu yang kompleks, (Hauser. 1967: 9).

melebihi migrasi keluar, terutama migrasi desa-kota. Reklasifikasi adalah alokasi penduduk suatu tempat yang sebelumnya adalah “desa” menjadi “kota” pada saat kriteria menjadi kota telah dicapai. Di Indonesia migrasi desa-kota masih menjadi determinan yang lebih signifikan daripada penambahan alami dalam proses urbanisasi. Dalam tahun 1970an, 54,8 % pertumbuhan penduduk kota di Indonesia karena migrasi dan reklasifikasi, dan telah terjadi penurunan yang tajam fertilitas penduduk di daerah perkotaan (Ogawa. 1985 : 10). Adapun pada tahun 1980 persentase penduduk yang masuk ke kota sebesar 70,6 % (Bandiyono. 1983: 232) Hal ini karena ada hubungan terbalik antara skala urbanisasi dengan besaran penduduk perdesaan (Romdiati. 1995).

Oleh karena itu isu mobilitas penduduk desa-kota dan urbanisasi merupakan suatu isu kependudukan yang banyak dibicarakan, karena terkait erat dengan proses urbanisasi. Proses migrasi ke kota umumnya dilakukan secara berantai. Mantra dan Molo (1985: 38) dalam penelitian migrasi sirkuler di enam kota besar di Indonesia menemukan bahwa tiap 100 orang responden berhasil membantu 46 orang dari daerah-daerah asal responden untuk bekerja di kota. Proses migrasi berantai seperti inilah yang menyebabkan jumlah migran sirkuler, makin lama semakin meningkat secara linier menuju pada suatu peningkatan secara eksponensial di masa depan ini.

Migrasi penduduk desa-kota secara garis besar dapat dibedakan antara mereka yang pindah secara permanen maupun yang sifatnya non-permanen. Di China migrasi non-permanen lebih dikenal dengan “*temporary movement*” atau secara resmi sebagai “*floating population*” atau *liudong renkou* (Wu, Weiping, 2002 : 91) Salah satu bentuk mobilitas non-permanen adalah mobilitas sirkuler. Sebab terjadinya sirkulasi yang dikemukakan oleh Mitchell (1961) yang dikutip dari Mantra dan Molo (1985), didasarkan pada keterikatan migran terhadap dua kutub yaitu daerah perdesaan dan kota atau daerah di mana ia bekerja. Dari hasil penelitian Mantra dan Molo (1985) dapat diketahui bahwa separuh migran sirkuler berasal dari keluarga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar. Migran sirkuler sebagian besar adalah laki-laki dimana 83 % berumur 15-34 tahun dan berpendidikan sangat rendah.

Urbanisasi sebagai suatu proses konsentrasi penduduk, telah melibatkan dua elemen : (1) multiplikasi titik-titik konsentrasi ; dan (2) kenaikan jumlah konsentrasi individu. Sebagai hasilnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan mengalami kenaikan. Urbanisasi di negara berkembang sering dilihat sebagai hal yang positif karena sebagai pertanda adanya perkembangan untuk mencapai kemajuan (Evers. 1982), namun dalam kenyataan di Indonesia urbanisasi mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan di perkotaan. Fenomena tersebut juga terjadi negara ASEAN (kecuali Singapore dan Brunai) yang lain bahwa sebagai konsekuensi atas migrasi internal yang meluas, banyak kota menghadapi masalah dari dampak urbanisasi yang cepat. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi, kekurangan perumahan dan berkembangnya permukiman kumuh yang ilegal (*squatter*) adalah representasi dari dampak yang tidak diinginkan dari perubahan distribusi penduduk (Ogawa. 1985: 1).

Hauser (1965: 10-24) menulis bahwa urbanisasi dapat pula dilihat sebagai variabel bebas dimana suatu kota dapat membuat berbeda dalam cara hidup penduduknya. Akibat kota terhadap cara hidup dapat diobservasi dalam masalah adaptasi migran masuk. Hal ini juga berhubungan dengan kota sebagai tempat tingkah laku dari berbagai fungsi yaitu : ekonomi, administrasi, agama, suatu jaringan untuk sirkulasi orang dan barang, serta jalan, alat transportasi, dan lain sebagainya. Kota sebagai aglomerasi penduduk telah mempengaruhi kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan pembagian kerja yang lebih besar dan lebih besar pula jumlah spesialis dalam kegiatan non-pertanian. Kenaikan pembagian kerja dan spesialisasi kegiatan penduduk perkotaan juga diakselerasikan oleh kemajuan teknologi. Selain itu juga menciptakan masyarakat lebih kompleks dan saling tergantung, yang dipengaruhi oleh lembaga sosial dan lembaga ekonomi. Dengan munculnya sebagai kota industri dan perluasan perdagangan, mekanisme pasar juga mengalami kenaikan, tergantung pada perintah ekonomi guna mengatur alokasi sumber daya dan untuk mengatur produksi baik barang maupun jasa. Dalam hal keluarga, bahwa lingkungan kota keluarga inti, keluarga dua generasi, cenderung menggantikan keluarga luas berupa keluarga tiga atau lebih generasi sebagai model unit rumah tangga. Selain itu perkembangan kota akan diikuti pula dengan bentuk-bentuk habitat yang lebih permanen sebagai "*man-made environment*."

DAMPAK MIGRASI DESA-KOTA DI PERKOTAAN

Sampai beberapa tahun silam, banyak literatur tentang akibat migrasi terhadap migran perorangan dicirikan dengan pandangan pesimistik tentang kesempatan migran di daerah perkotaan. Kesulitan yang dihadapi dalam adaptasi tentang lingkungan dan budaya kota (*urban*), ketidakmampuan secara ekonomi dibandingkan dengan penduduk setempat, ketidakmampuan untuk melakukan mobilitas ke atas (*upward mobility*) di kota, dan frustrasi mereka, merupakan thema yang konstan (United Nations, 1982: 191). Di negara berkembang karena migran yang masuk ke daerah perkotaan yang sebagian besar datang dari lapisan menengah dan bawah, mereka cenderung untuk melakukan kegiatan secara informal dan bermukim di daerah kumuh baik *slum* maupun *squatter*. Di negara-negara berkembang penduduk yang bekerja pada sektor informal di perkotaan yang makin berkembang, akan diikuti oleh meningkatkan masalah kemiskinan. Di Beijing dan Shanghai kondisi migran non-permanen atau "*temporary migrants*" dideskripsikan (Wu, Weiping, 2002:105) : "*Temporary migrants occupy far less space and endure poorer conditions. Overcrowding seems to be a feature of migrant housing, with each person using only a third of the space occupied by a typical urban resident. These migrants also tend to live in dwellings that are less equipped with kitchen/bathroom facilities, are used for working or other purposes in addition to serving as residences, and have less stable structural features (such as temporary dorms on construction sites).*"

Kegiatan sektor informal di kota akan meningkat bila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan sebaliknya. Meskipun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi pada sektor informal mampu menyerap tenaga kerja sehingga terhindar dari krisis moneter. Selain itu proporsi penduduk yang bekerja pada sektor informal juga berkaitan erat dengan kepadatan penduduk (Bandiyono. 1986). Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor tersebut akan menuntut pelayanan publik yang makin besar, padahal daerah perkotaan di Indonesia mempunyai keterbatasan sumber daya pembangunan. Hal ini merupakan realitas sosial yang muncul dalam wacana pembangunan yang merefleksikan interaksi yang dinamis antara ruang dan kemiskinan. Dalam hal ini mobilitas penduduk telah diasumsikan berperan besar dalam membangun strategi kehidupannya (Afsar. 2004).

McGee (1982) melihat adanya hubungan yang saling menguntungkan antara mode produksi non-kapitalis yang masuk sektor informal, dengan mode produksi kapitalis daerah perkotaan. Mekanisme yang terjadi bahwa usaha kecil non-kapitalis tersebut tetap terjaga kelangsungannya yaitu merupakan bagian dari mode produksi kapitalis. Usaha kecil dalam mode produksi non-kapitalis tersebut dapat bertahan karena dapat melayani barang dan jasa untuk penduduk berpenghasilan rendah. Terkait dengan persoalan tersebut, aspirasi dari kebanyakan migran yang banyak bekerja pada sektor tradisional di kota menganggap bahwa sektor tersebut bukan cara untuk masuk sektor modern tetapi justru sektor tradisional tersebut sebagai tujuan (Temple.1974; Chandury.1978). Di daerah perkotaan mereka yang bekerja pada sektor tradisional (informal) pada umumnya memproduksi dan hidup dalam kondisi subsisten. Dalam hubungan ini Gerry (1977) yang dikutip dari McGee (1982) mengemukakan adanya fungsi pembagian angkatan kerja dalam pasar kerja yang berkaitan dengan tipe mobilitas penduduk, yaitu :

Fungsi angkatan kerja	Tipe mobilitas
A. Pekerja dalam mode kapitalis, sektor formal	Permanen
B. Pekerja lepas dalam mode produksi	Musiman Sirkuler
C. Tenaga yang terlatih dalam mode Produksi kapitalis, sektor informal	Permanen Sirkulasi Musiman
D. Pencari kerja	Sirkulasi

Evers dan Korff (2002), menyatakan bahwa jenis produksi subsisten ini biasanya dijalankan oleh penghuni daerah kumuh di kota-kota besar. Kendati kegiatan mengurus rumah tangga, terutama pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan salah satu bentuk terpenting produksi subsisten, berpatokan pada kegiatan ini saja tentu tidak memadai. Di negara berkembang, pekerjaan reparasi alat, menggali sumur, membangun rumah, berjualan, dan lain-lain adalah pekerjaan pelengkap yang sangat penting perannya

bagi ekonomi subsisten kota. Ada beberapa tipe jalinan antara sektor formal (F) dan sektor informal (I) serta sektor subsisten (S) :

1. Tipe F (Sektor Formal) : yang paling dominan adalah penghasilan pekerja yang bergaji, sumbangan produksi subsisten tidak begitu penting, dan tidak ada penghasilan tambahan dari sektor informal.
2. Tipe FS (Sektor Formal-Subsisten) : yang paling penting perannya adalah pendapatan tenaga kerja bayaran yang bekerja di sektor formal, dan konsumsi dipenuhi dengan produksi subsisten.
3. Tipe FIS (Sektor Formal, Informal dan Subsisten) : tingkat jalinan ketiga sektor sangat tinggi dan sama penting.
4. Tipe FI (Sektor Formal dan Informal) : penghasilan tenaga bayaran yang bekerja di sektor formal dan kegiatan-kegiatan di sektor informal sama pentingnya, sedangkan produksi subsisten tidak signifikan. Sama dengan tipe F, pendapatan dan belanja rumah tangga pada umumnya dilakukan lewat pasar.
5. Tipe IS (Sektor Informal dan Subsisten) : sumber pendapatan utama adalah sektor informal tetapi berhubungan dengan produksi subsisten. Pendapatan tenaga kerja bayaran dari sektor formal hanya bersifat sporadis.

Karena tingkat pendidikan yang baik merupakan syarat untuk bekerja di sektor formal, rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik berpeluang memiliki kombinasi tipe F dan tipe FI dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Daerah kumuh – sering didefinisikan sebagai daerah permukiman para pekerja daripada sebagai “komunitas” atau tempat orang-orang yang putus asa (Korff 1985; Evers dan Korff 1986) – terintegrasi dengan ekonomi kota. Produksi dalam rumah tangga bergantung pada pendapatan uang yang dihasilkan dengan bekerja di berbagai bidang pencaharian dan melalui berbagai hubungan sosial. Dari kondisi yang kebanyakan ada di permukiman kumuh kota-kota besar, memang hampir semua penghuninya bekerja di sektor informal. Hal inilah yang kemudian banyak menyebabkan timbulnya asumsi bahwa kekumuhan yang terjadi di kota-kota besar akibat dari banyaknya pekerja sektor informal tersebut.

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, urbanisasi kadang-kadang justru dapat menjadi alternatif terbaik dalam membantu proses pembangunan di daerah pedesaan. Hal ini tentu saja tergantung dari rencana migran dimasa yang akan datang (Yeremias. 1988). Dampak langsung antara lain dapat dilihat dari orientasi tentang remitan yang cenderung dikirim kepada keluarga yang ada di desa, karena mereka sering pulang dan selalu menjaga hubungan. Jellinek (1978), misalnya dalam studinya lebih dari 200 pedagang keliling di Jakarta dapat diketahui bahwa mereka mengirim ke desanya dari setengah pendapatannya. Hugo (1983: 40) menulis “ *It is clear that the flows associated with temporary moves tend to be greater not only in absolute amounts but also relative to the total income of both mover and family of origin.*”

Meskipun demikian urbanisasi juga menimbulkan masalah kemiskinan di daerah perkotaan seperti yang ditulis oleh Young (1983:11) sebagai berikut : “ *One consequent*

characteristic of rapid Asian urbanization is widespread urban poverty and the enormous number of urban dwellers suffering from a severe lack of basic services." Permukiman di kota yang miskin terhadap pelayanan publik dasar, pada umumnya dikenal sebagai permukiman kumuh yang mempunyai dua kategori yaitu *slums* dan *squatter*.² Adapun Bappeda DKI membedakan kategori daerah kumuh dilihat dari kesesuaian dengan tata ruang kota yaitu menjadi legal dan illegal.³ Selain itu permukiman kumuh diklasifikasikan pula dilihat dari segi fisik dan nonfisik. Permukiman kumuh mempunyai ciri sebagai berikut (Sinulingga, 1999):

1. Penduduk sangat padat, yaitu antara 250 – 400 jiwa/ha.
2. Sebagian besar lokasinya berada di pusat kegiatan ekonomi kota.
3. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
4. Fasilitas drainase tidak memadai, sehingga apabila hujan turun kawasan ini akan tergenang air.
5. Kualitas udara tidak baik (menurun) karena tidak ada *open space*.
6. Udara di dalam rumah tidak mengalir.
7. Tidak ada "privacy" bagi penghuni rumah akibat banyaknya ruang dengan penghuni tidak sebanding.
8. Fasilitas MCK yang kurang memadai.
9. Fasilitas sumber air bersih yang sangat minim.
10. Tata bangunan yang tidak teratur dan tidak permanen.
11. Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, karena status tanahnya masih merupakan tanah negara dan pemilik tanah tidak memiliki status apa-apa yang sering menyebabkan penggusuran.

Dalam kenyataan akibat migrasi dalam pembangunan regional memberi gambaran yang lebih kompleks daripada hubungan yang menganggap migrasi sebagai variabel tergantung daripada variabel bebas (Hugo, 1985: 15). Bagi kota-kota metropolitan yaitu berpenduduk di atas sejuta orang seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan, telah menjadi tujuan utama migrasi penduduk dari daerah perdesaan yang menjadi *hinterland* dan migrasi penduduk dari luar provinsi, maka proses urbanisasi yang

² Daerah "*slums*" merupakan daerah permukiman yang di akui, tetapi karena kemiskinan yang diderita penghuninya sehingga tidak dapat membiayai pembangunan lingkungannya. Sedangkan daerah "*squatter*" adalah permukiman kumuh dan miskin yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, yaitu dengan cara menempati ruang-ruang publik terbuka yang semestinya tidak diperuntukkan bagi permukiman dan kawasan hunian. Biasanya "*squatter*" ini menjarah ruang-ruang terbuka (*open space*) perkotaan yang berbahaya, seperti pinggir sungai, di bawah jembatan (baik air maupaun layang), taman-taman serta biasanya di pinggir rel kereta api. (Warsilah Henny, 2000).

³ a. Kumuh yang sesuai dengan tata ruang, yang dibagi menjadi 2, yaitu

* *Legal*, apabila berbentuk rumah, ada sertifikat, karena adanya pengaruh migrasi lambat laun jadi "kumuh" karena sarana yang tidak memadai

* *Illegal*, berbentuk permukiman tetapi penghuninya bukan pemiliknya

b. Kumuh yang tidak sesuai dengan tata ruang, yang pada umumnya *illegal*

kurang terkendali dan tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan, dapat merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam pembangunan kota-kota tersebut. Meskipun demikian tingkat urbanisasi di Indonesia yang masih tergolong rendah belum begitu mengkhawatirkan dibandingkan dengan negara lain (Yeremias. 1988: 22).

Dampak migrasi tentu saja tergantung pada jumlah yang terlibat, lamanya konsentrasi migran dan selektivitas migran. Kendati dampak migrasi adalah kompleks tetapi karena telah dapat diantisipasi adanya proses peningkatan migrasi desa-kota, Hugo (1985) telah mengidentifikasi dampak negatif migrasi desa-kota sebagai berikut ini :

No	Daerah perdesaan	Daerah perkotaan
1	Berkurangnya angkatan kerja	Tekanan terhadap pelayanan
2	Tingginya rasio ketergantungan	Tekanan terhadap kesempatan kerja dan pendidikan
3	Pisahannya pasangan suami-istri, menimbulkan kenaikan perceraian dan perubahan peran wanita	Kurangnya partner potensial untuk kawin sehingga timbul kesepian
4	-	Menaikkan tingkat fertilitas
5	Beban wanita menjadi bertambah	Jumlah anggota keluarga menjadi besar sehingga muncul masalah perumahan
6	Kesulitan/kekurangan buruh	-
7	Hilangnya wiraswasta sehingga mengurangi kesempatan kerja	Upah tetap bertahan rendah
8	Berkurangnya tenaga kerja yang berkualitas baik	Tenaga terampil kurang memperoleh kesempatan
9	Dalam jangka panjang bisa terjadi stagnasi ekonomi setempat	Pengangguran bertambah
10	Melemahnya ikatan keluarga	Perpecahan dalam sistem keluarga
11	Perceraian naik	-
12	Pelayanan lebih "urban bias"	Tekanan terhadap prasarana angkutan air, kesehatan ,dsb
13	-	Tekanan terhadap kebutuhan perumahan

Sejalan dengan dampak yang diakibatkan oleh konsentrasinya 'urban proletariat' di daerah perkotaan, diilustrasikan oleh Gavin Jones yang dikutip dalam Tirtosudarmo (1986) sebagai berikut : *" From the poor planners' view point, the poor are a headache. Many of them are in the city illegally, without valid papers. Many of them are housed illegally (if 'housed' is not too elegant a word) in areas subject to flooding, or slated for road widening or other developmental uses, or in parks, or dangerously close to railway lines. Many of them angage in occupations that administrators and planners would like to do away with, including becak driver, hawking ang street vending, prostitution, begging and*

scavenging. They are a threat to elite, as evidenced by their sporadic expressions of resentment towards police and city functionaries sent to evict them and their meager possessions from illegal shacks build on land required for road widening, and their inexplicable desire to throw rocks at and set fire to massage parlours.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsar Rita (2004). "Dynamics of Poverty, Development and Population Mobility: the Bangladesh Case." *Asia-Pacific Population Journal Vol.19, No.2, 2004.*
- Bairoch, Paul (1973). *Urban Unemployment in Developing Countries*, Geneve: ILO.
- Bandiyono Suko (1983). "Pekerjaan di Luar Sektor Pertanian dan Migrasi Desa-kota: Suatu respon terhadap tekanan penduduk dan pembangunan di Jawa." *Masyarakat Indonesia Th. ke X No.2. 1983.*
- Bandiyono Suko dan John D. Conroy (1983). "Employment and Income from Non-Agricultural Sources in Rural East Java; Some Preliminary Findings." Makalah disampaikan untuk konperensi "Off-farm Employment in the Development of Rural Asia." Chiangmai, Thailand 22-26 Agustus 1983.
- Bandiyono Suko (1986). "Mobilitas Desa-Kota dan Urbanisasi." Makalah disampaikan pada Simposium Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Yogyakarta 5-7 Mei 1986.
- Chander Ramesh, H.Karunanayake, J. de Vera, dan Stephen H.K. Yeh. (1979)."Housing Conditions and Housing Needs." Dalam Stephen H.K.Yeh and A.A.Laquian (eds), *Housing Asia's Millions: Problems, Policies, and prospects for Low-Cost Housing Southeast Asia*. Ottawa: IDRC
- Chandhury, Rafiqul Huda (1978). Determinants and Consequences of Rural Out-Migration Evidence from Some Villages in Bangladesh. Dalam *The Oriental Geographer Vol.XXII. Nos.1&2. 1978*
- Costello Michael A, Thomas R. Leinbach, Richard Ulack, Marilou Palabrika Costello and Bambang Suwarno. (1987). *Mobility and Employment in Urban Southeast Asia*. Boulder, Colorado : Westview Press Inc.
- Evers, Hans Dieter (1982). *Sosiologi Perkotaan*. Jakarta : LP3ES.
- Evers, Hans Dieter dan Korff Rudiger, (2002). *Urbanisme Di Asia Tenggara*. Mestika Zed (ed). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Findley S. Sally. (1977). *Planning for Internal Migration: A Review of the Issues and Policies in Developing Countries*. International Statistical Programs Center Research Document No.4. Washington DC: United States Department of Commerce, Bureau of the Census.
- Geertz, Clifford J.(1966). *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Barkeley : University of California Press

- Hauser, Philip M.(1965).”Urbanization: An Overview.” Dalam Philip M. Hauser dan Leo F. Schnore (eds). *The Study of Urbanization*. New York ,London , Sydney: John Wiley & Sons
- Hugo, Graeme J (1983). “Population mobility and wealth transfers in Indonesia and other Third World societies.” *Papers of the East-West Population Institute No.87*
- Hugo, Graeme J (1985). “Some Policy Aspects of the Relationships Between Internal Migration and Regional Development in Less Developed Countries With Particular Reference to Indonesia.” Centre for Development Studies, The Flinders University of South Australia. Discussion Paper No.9.
- Hugo, Graeme J (1985). “Some Policy Aspects of the Relationships Between Internal Migration and Regional Development in Less Developed Countries With Particular Reference to Indonesia.” Centre for Development Studies, The Flinders University of South Australia. Discussion Paper No.9.
- Jellinek, Lea (1978). “The pondok system and circular migration.” Dalam Lea Jellinek, Chris Manning, Gavin Jones, eds., *The Life of the Poor in Indonesia Cities*. Clayton: Monash University.
- Mantra, IB dan Molo,M. (1985). “ Mobilitas Penduduk ke Enam Kota Besar di Indonesia.” Makalah disampaikan pada Konperensi Nasional Pusat Studi Kependudukan III, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta: 15-17 Oktober 1985.
- Mazumdar, Dipak (1987). “Rural to Urban Migration and Labour Markets.” Dalam Roland J.Fuch et.al (ed). *Urbanixation and Urban Policies in Pacific Asia*. Boulder : Westview Press.
- McGee, TG (1982). Labour Mobility in Fragmented Labour Markets, the Role of Circulatory Migration in Rural-Urban Relation in Asia. Dalam *Towards a Political Economy of Urbanization in Third World Countries*. New Delhi : Oxford University Press.
- Noveria, Mita (1993). “Rural to Urban Migration in Relation With Educational Expansion in the Less Developed Countries: A Literature Review.” *Penduduk & Pembangunan*. Jilid IV, No. 2-3.
- Ogawa Naohiro.(1985). “Urbanization and Internal migration in Selected ASEAN Countries : Trends and Prospects.” Nihon University Population Research Institute, Tokyo Japan. *NUPRI Reprint Series No.16*.
- Permukiman kumuh, http://www.bappedajakarta.go.id/jktbangun/permukiman_1.htm#area.
- Population Headliners, ESCAP*, No.254, Sptember-October 1996.
- Ravenstein, EG (1889). “The Laws of Migration.” *Journal of the Royal Statistical Society*, 52.
- Romdiati Haning (1995). “The Impact of Rapid Urbanization on Urban Employment Problems in Indonesia.” Dalam *Buletin Pengkajian Masalah Kependudukan dan Pembangunan V &VI (3 &1) 1994-1995*.

- Sinulingga, Budi D, (1999). *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Silas Johan (2001). "Brief Account on Housing in Indonesia". Makalah dipesiapkan untuk Istanbul +5. <http://www.achr.net/johan-silas-h5.htm>
- Sovani N.V, (1964). "The Analysis of Over-Urbanization,". *Economic Development and Cultural Change*. 12 (January 1964).
- Steel, Ross McLean (1980). *Origins and Occupational Mobility of Lifetime Migrants to Surabaya, East Java*. Thesis untuk memperoleh gelar Ph.D di Australian National University.
- Tirtosudarmo, Riwanto (1986). "Migration of the Poor to Jakarta." *Media Leknas-LIPI*. V (02).
- Today, M. (1983). "A Model of Labour Migration and Urban Unemployment in LDCs." *American Economic Review* Vo.59.1983
- United Nations (1985). *Migration, Population Growth and Employment in Metropolitan Areas of Selected Developing Countries*. New York : Department of International Economic and Social Affairs. ST/ESA/SER-R/57
- Warsilah Henny. (2000). 'Komentor dan Bahasan Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Yogyakarta Kasus Kelurahan Keparakan.' Makalah disampaikan pada Seminar Upaya Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Yogyakarta. Diselenggarakan oleh PEP-LIPI, 2 Maret 2000.
- Wu, Weiping (2002). "Migrants Housing in Urban China Choice and Constraints." *Urban Affairs Review*, Vol.38, No.1.
- Yeung Y.M. (1983). "Introduction." Dalam Y.M.Yeung (ed). *A Place to Live: More Effective Low-Cost Housing in Asia*. Ottawa : IDRC.